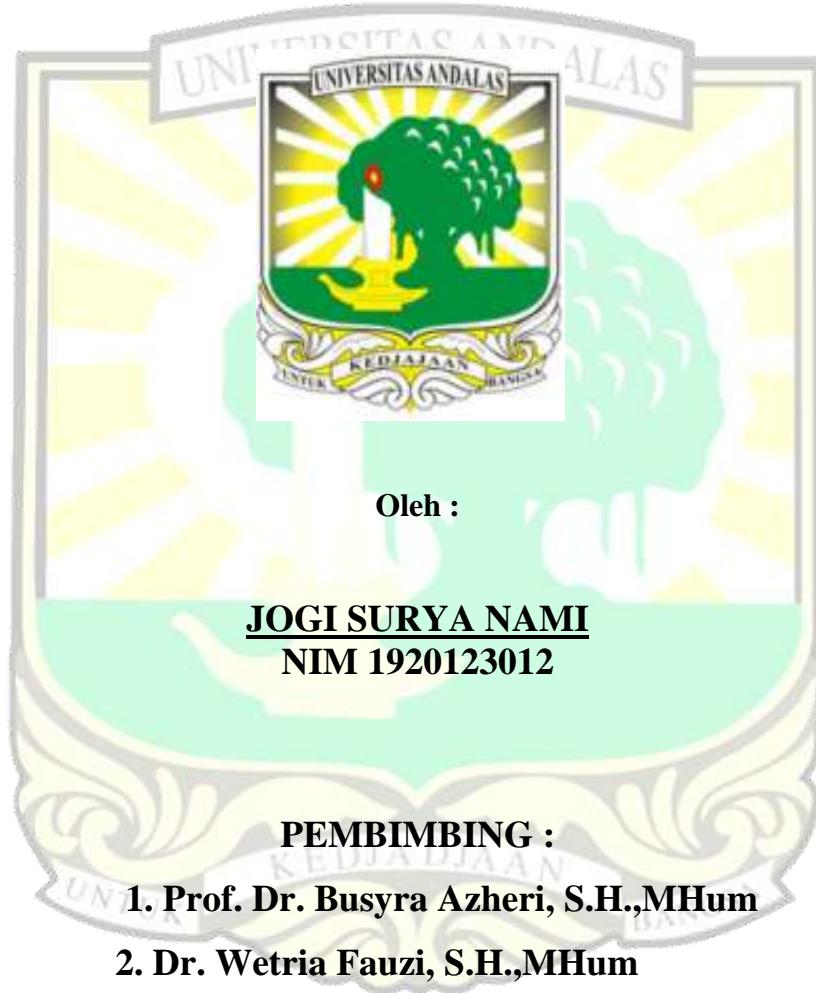


TESIS

**STATUS HUKUM PT. RIAU AIRLINES PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG PK NO. 129PK/Pdt.Sus-Pailit/2013**

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (MKn)**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2023**

STATUS HUKUM PT. RIAU AIRLINES PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PK NO. 129PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

ABSTRAK

PT. RAL sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berwujud Perseroan Terbatas, yang cakap mengadakan hubungan hukum atau melakukan perbuatan hukum dengan subjek hukum yang lainnya, PT. Riau Airlines (PT. RAL) telah menghentikan kegiatan bisnis sejak awal September 2010, pada Tahun 2012 PT. RAL dinyatakan pailit dalam perkara Nomor 622 K/Pdt.Sus/2012, Mahkamah Agung menyatakan pailit terhadap PT. Riau Airlines, karena adanya hutang yang jatuh tempo dan wajib ditagih serta adanya hutang pada 2 (dua) kreditur yang lain selain PT. Bank Muamalat Indonesia, dalam pengelolaan BUMD, namun dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) No 129PK/pdt.sus-pailit/2013, maka putusan pailit PT. Riau Airlines dibatalkan, PT. Riau Airlines yang dalam keadaan tidak pailit namun menghentikan kegiatan bisnisnya hingga sekarang, hal ini menimbulkan permasalahan, kepala daerah sebagai pemegang saham sangat berperan, tanggung jawab pemegang saham terhadap kelangsungan PT. Riau Airlines setelah putusan PK tersebut agar menjelaskan status hukum PT. Riau Airlines belum terlaksana, saat ini PT. Riau Airlines berstatus PT yang aktif namun tidak melakukan kegiatan usaha dan tidak dapat memberikan keuntungan kepada daerah khususnya Riau, kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan BUMD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dalam jabatannya, pemegang saham BUMD memiliki kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangannya tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, tujuan penelitian ini untuk mengetahui status hukum PT. Riau Air Lines pasca putusan PK No. 129PK/Pdt.Sus-Pailit dan untuk mengetahui tanggung jawab pemegang saham terkait PT. Riau Airlines yang tidak beroperasi, metode penelitian normatif, melalui pendekatan sejarah dan perundang-undangan, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasar pada teori dan aturan-aturan yang berlaku.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Daerah, PT. Riau Airlines

**LEGAL STATUS OF PT. RIAU AIRLINES POST SUPREME COURT
DECISION PK NO. 129PK/Pdt.Sus-Bankruptcy/2013**

ABSTRACT

PT. RAL as a Regional Owned Enterprise in the form of a Limited Liability Company, which is capable of entering into legal relations or carrying out legal actions with other legal subjects, PT. Riau Airlines (PT. RAL) has stopped business activities since the beginning of September 2010, in 2012 PT. RAL was declared bankrupt in case Number 622 K/Pdt.Sus/2012, the Supreme Court declared bankruptcy against PT. Riau Airlines, due to debts that are due and must be collected and debts to 2 (two) other creditors besides PT. Bank Muamalat Indonesia, in the management of Regional Owned Enterprise, but with the Judicial Review decision No 129PK/pdt.sus-bankrupt/2013, the bankruptcy decision for PT. Riau Airlines canceled, PT. Riau Airlines which is not in a state of bankruptcy but has stopped its business activities until now, this has caused many problems, the regional head as a shareholder plays a very important role, this is because, his role as the general authority holder in Regional Owned Enterprise management, the regional head as the authority holder in Regional Owned Enterprise management has been regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional Owned Enterprises, in their position, Regional Owned Enterprise shareholders have the authority to carry out overall regional financial management and have the obligation to submit accountability for the implementation of this authority to the House of Representatives Region in accordance with applicable regulations, the purpose of this study was to determine the legal status of PT. Riau Airlines after PK decision No. 129PK/Pdt.Sus-Bankrupt and to find out the responsibilities of shareholders regarding PT. Riau Airlines which is not operating, normative research method, through historical and statutory approaches, this research is a normative juridical research based on theory and applicable rules.

Keywords: Limited Liability Company, Regional Owned Enterprise, PT. Riau Airlines